

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi kebijakan Bitcoin bukanlah sebuah inkonsistensi ideologis, melainkan bentuk manuver pragmatis yang lahir dari evaluasi pilihan rasional (*rational choice*) untuk memaksimalkan utilitas (*utility maximization*). Pemerintah El Salvador secara sadar mengkalibrasi ulang preferensi kebijakannya ketika utilitas dari mempertahankan eksperimen moneter radikal terbukti jauh lebih rendah dibandingkan dengan ancaman kebangkrutan makroekonomi akibat isolasi dari rezim keuangan internasional.

Penelitian ini membuktikan bahwa pada fase awal, pengesahan *Bitcoin Law* 2021 memicu friksi struktural yang masif dengan rezim keuangan global karena sifat *forced tender* atau penawaran paksa yang mendistorsi tatanan moneter internasional berbasis fiat. Langkah sepihak ini direspons secara agresif oleh rezim melalui pengawasan institusional, mulai dari teguran tim teknis hingga peringatan keras dalam Laporan Konsultasi Pasal IV IMF yang mengekspos liabilitas kontinjensi serta kerapuhan fiskal negara tersebut. Perselisihan (*discord*) ini membuktikan postulat liberalisme institusional bahwa rezim internasional bertindak sebagai aktor otonom yang secara rasional mengaktifkan mekanisme penegakan kepatuhan untuk menekan anomali yang mengancam stabilitas ekonomi makro global.

Lebih lanjut, analisis membuktikan bahwa tekanan rezim moneter internasional mencapai titik penetrasi terkuatnya melalui mekanisme kondisionalitas struktural dalam kebuntuan negosiasi *Extended Fund Facility* (EFF). IMF memanfaatkan posisinya sebagai jangkar stabilitas finansial global dan menahan akses likuiditas senilai \$1,3 miliar hingga \$1,4 miliar di tengah ancaman gagal bayar (*debt default*) yang menghantui El Salvador. Ketergantungan asimetris ini secara

empiris memaksa pemerintah El Salvador mengubah struktur insentif kebijakannya, di mana kepatuhan terhadap tuntutan rezim bergeser menjadi opsi yang lebih rasional secara ekonomi dibandingkan mempertahankan kedaulatan moneter secara mutlak yang dapat berujung pada kolapsnya sistem fiskal domestik.

Dalam merespons tekanan tersebut, rasionalisasi pemerintah El Salvador terbukti melalui pergeseran utilitas utamanya, dari yang awalnya mengejar otonomi finansial digital menjadi prioritas mutlak pada penyelamatan stabilitas makroekonomi. Volatilitas harga aset kripto dan krisis likuiditas yang menggerus cadangan devisa hingga level terendah pada tahun 2022 mengancam keberlangsungan rezim dolarisasi domestik. Hal ini membuktikan bahwa di bawah kondisi kelangkaan sumber daya yang ekstrem, aktor rasional akan menanggalkan instrumen kebijakan yang tidak lagi efektif. Yang dalam konteks ini diwujudkan melalui transisi menuju adopsi moderat (*soft adoption*) dengan menghapus kewajiban sektor swasta untuk menerima Bitcoin demi menyelamatkan kelayakan ekonomi nasional.

Proses adaptasi ini semakin terkonfirmasi melalui analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) yang dilakukan oleh administrasi Bukele. Analisis di Bab IV membuktikan bahwa manfaat yang diperoleh dari merevisi kebijakan, seperti persetujuan program EFF senilai 1,4 miliar dolar, efek katalitik yang membuka paket bantuan multilateral hingga 3,5 miliar dolar, serta penurunan tajam premi obligasi berdaulat (*sovereign bond spreads*) jauh melampaui biaya politik domestik akibat mundurnya narasi revolusi digital. Melalui kompromi rasional ini, pemerintah berhasil mereduksi defisit akut dan melakukan operasi pembelian kembali utang (*buyback*), membuktikan bahwa mengorbankan sebagian kecil otonomi kebijakan Bitcoin adalah konsesi yang sepadan demi jaminan likuiditas.

Selain itu, evaluasi terhadap biaya peluang (*opportunity cost*) terbukti memainkan peran krusial dalam meruntuhkan sikap pembangkangan El Salvador (Keohane, 1984). Jika *Bitcoin Law* dipertahankan secara absolut, negara tersebut harus menanggung biaya isolasi permanen dari pasar modal global, penurunan peringkat utang hingga level spekulatif (CCC+), dan eskalasi biaya pinjaman (*spread*) yang melumpuhkan. Setelah pemerintah menunjukkan rasionalitas fiskal dengan

mematuhi rekomendasi multilateral, pemulihan peringkat kredit terjadi secara signifikan. Fakta ini secara sah membuktikan bahwa pengakuan internasional terhadap stabilitas fiskal memiliki nilai fundamental yang jauh mengalahkan ilusi desentralisasi moneter jangka pendek.

Hal yang tak kalah penting, analisis Bab IV juga berhasil membuktikan bahwa intervensi dan kondisionalitas institusi internasional turut dikapitalisasi sebagai alat politik domestik oleh pemerintah El Salvador. Tekanan restrukturisasi dari paket pinjaman IMF memberikan justifikasi eksternal yang rasional bagi eksekutif untuk merevisi regulasi dompet digital dan mencabut status penawaran paksa (*forced tender*) yang pada dasarnya kurang populer di tingkat akar rumput. Dengan menggunakan rezim global sebagai perisai rasionalisasi, pemerintah dapat menjalankan reformasi tata kelola ekonomi tanpa harus menanggung seluruh beban kehilangan legitimasi di mata konstituen pro-kripto.

Sintesis dari seluruh rasionalisasi di atas membuktikan terjadinya fenomena kepatuhan asimetris yang diwujudkan melalui skema *mutual adjustment*. El Salvador tidak serta-merta tunduk sepenuhnya secara pasif, melainkan melakukan adaptasi defensif dengan menyeimbangkan pemenuhan tuntutan rezim, seperti implementasi standar perbankan Basel III dan penguatan kontrol AML/CFT, tanpa membatalkan secara total kepemilikan aset kripto negaranya. Mereka berhasil mengakomodasi tekanan rezim untuk merestorasi integritas pasar konvensional, sembari secara simultan mengamankan cadangan token residu strategis sebagai instrumen diversifikasi berisiko tinggi.

Melalui dinamika penyesuaian kebijakan ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, di era digitalisasi finansial, inovasi teknologi desentralisasi keuangan yang diadopsi oleh suatu negara berkembang tetap tidak akan mampu berdiri sendiri atau melepaskan diri secara mutlak dari jerat hierarki keuangan konvensional. Struktur mapan dari institusi keuangan global seperti IMF terbukti masih memiliki hak veto finansial yang terlalu kuat melalui kendali atas likuiditas dunia. Kedua, terdapat pelajaran mengenai batasan dari kedaulatan moneter negara berkembang di bawah sistem interdependensi yang asimetris. Eksperimen moneter yang mengabaikan

norma atau aturan main rezim finansial global akan langsung dihitung sebagai biaya oportunitas yang teramat mahal berupa pengucilan pasar, penurunan peringkat utang, dan risiko gagal bayar utang. Oleh karena itu, bagi negara berkembang, jalan paling rasional dalam mengadopsi disrupsi teknologi finansial bukanlah melalui konfrontasi radikal sepihak, melainkan melalui integrasi bertahap yang adaptif dan akomodatif terhadap standar tata kelola internasional demi menjaga stabilitas makroekonomi domestik.

Sebagai konklusi akhir, hasil analisis penelitian ini membuktikan secara definitif tesis liberalisme institusional dan pilihan rasional bahwa dalam anarki sistem internasional yang interdependen, negara secara naluriah tidak dapat melepaskan diri dari hegemoni rezim struktural. Revisi *Bitcoin Law* oleh El Salvador adalah monumen kegagalan pasar politik (*political market failure*) yang dihindari tepat pada waktunya melalui rasionalisasi. Tekanan kondisionalitas IMF berhasil mengubah struktur utilitas negara, memaksa El Salvador untuk kembali melabuhkan sauh kebijakannya pada tradisi keuangan internasional konvensional guna merawat stabilitas makroekonomi, sembari menavigasi batas-batas otonomi yang masih tersisa di era digitalisasi finansial.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik dari hasil analisis mengenai kalkulasi rasional pemerintah El Salvador dalam merevisi kebijakan Bitcoin akibat tekanan kondisionalitas IMF, penelitian ini merumuskan beberapa saran yang dibagi menjadi dua dimensi. Saran-saran ini ditujukan baik untuk pengembangan literatur ilmu Hubungan Internasional maupun sebagai bahan pertimbangan praktis bagi para pembuat kebijakan.

5.2.1 Saran Akademis

Bagi penelitian selanjutnya di bidang Ekonomi Politik Internasional, sangat disarankan untuk melakukan studi komparatif lintas negara yang

mengkaji respons institusi multilateral terhadap kebijakan adopsi aset digital. Mengingat penelitian ini berfokus tunggal pada kasus El Salvador, studi masa depan dapat membandingkan fenomena ini dengan negara-negara berkembang lainnya yang mencoba mengadopsi mata uang kripto atau mata uang digital bank sentral (CBDC) di tengah ketergantungan fiskal pada lembaga donor. Perbandingan dengan kasus seperti Republik Afrika Tengah dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai apakah pola tekanan rezim dan bentuk kepatuhan asimetris yang terjadi bersifat universal atau sangat bergantung pada kondisi geopolitik masing-masing negara.

Kedua, penelitian akademis di masa depan direkomendasikan untuk memperluas kerangka analitis dengan menggabungkan teori Pilihan Rasional dengan pendekatan Konstruktivisme. Meskipun penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adaptasi kebijakan El Salvador adalah murni kalkulasi ekonomi politik untuk menghindari gagal bayar, ada ruang yang luas untuk meneliti bagaimana wacana atau narasi "kedaulatan" dan "anti-imperialisme" dibangun di tingkat domestik untuk membenarkan konsesi kepada IMF. Analisis diskursus terhadap retorika para elit politik El Salvador akan melengkapi penjelasan rasionalis dengan memberikan gambaran tentang bagaimana identitas negara dikonstruksi ulang di tengah tekanan struktural.

Ketiga, studi longitudinal yang melampaui periode 2024-2025 sangat diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari model *mutual adjustment* atau penyesuaian bersama yang dilakukan El Salvador. Penelitian selanjutnya perlu melacak apakah kompromi institusional berupa pencabutan sifat *forced tender* dan penerapan kontrol *Anti-Money Laundering* (AML) benar-benar mengarah pada stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan dalam satu dekade ke depan. Hal ini penting untuk menguji apakah kepatuhan parsial negara dunia ketiga terhadap rezim keuangan global merupakan solusi permanen atau sekadar taktik penundaan krisis (*buying time*).

Keempat, literatur Hubungan Internasional perlu memberikan perhatian yang lebih mendalam pada peran aktor non-negara, khususnya

lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch, Moody's, dan S&P, sebagai perpanjangan tangan dari rezim pengawasan keuangan global. Berdasarkan temuan bab sebelumnya, penurunan peringkat kredit berperan sebagai katalisator yang memperburuk biaya peluang (*opportunity cost*) El Salvador. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat secara khusus membedah mekanisme bagaimana lembaga pemeringkat swasta ini bertindak sebagai penegak norma (*norm enforcer*) tidak resmi yang membatasi otonomi kebijakan moneter negara berdaulat.

Kelima, disarankan agar akademisi mulai merumuskan kerangka teoritis baru mengenai "Otonomi Finansial di Era Digital" (*Financial Autonomy in the Digital Age*). Kasus El Salvador membuktikan bahwa inovasi teknologi desentralisasi seperti Bitcoin tidak serta-merta menganulir hegemoni arsitektur keuangan tradisional. Dunia akademis perlu mengkaji batas-batas otonomi yang dapat dicapai oleh negara berkembang ketika teknologi *blockchain* berbenturan dengan arsitektur kekuasaan fiat yang dikendalikan oleh institusi Bretton Woods, sehingga memperkaya diskursus mengenai asimetri kekuasaan dalam ekonomi politik global kontemporer.

5.2.2 Saran Praktis

Bagi negara-negara berkembang (Global South) yang berencana mengadopsi teknologi keuangan desentralisasi, disarankan untuk menghindari pendekatan radikal sepihak seperti penerapan kebijakan penawaran paksa (*forced tender*). Kasus El Salvador memberikan pelajaran berharga bahwa distorsi yang tiba-tiba terhadap tatanan moneter konvensional akan segera memicu reaksi resistensi dan sanksi tidak langsung dari rezim keuangan global. Negara berkembang sebaiknya mengadopsi model *regulatory sandbox* atau integrasi bertahap yang bersifat sukarela (*soft adoption*), sehingga inovasi finansial dapat berjalan tanpa harus memutus akses vital terhadap likuiditas dan jaring pengaman dari institusi multilateral.

Bagi pemerintah El Salvador secara khusus, disarankan untuk mempertahankan komitmen yang kuat terhadap kesepakatan tingkat staf (staff-level agreement) dengan IMF, terutama terkait penegakan transparansi fiskal dan standar perbankan internasional. Meskipun cadangan residu Bitcoin masih dipertahankan sebagai instrumen diversifikasi, pemerintah harus memastikan bahwa manuver investasi digital negara tidak lagi membebani anggaran publik. Disiplin dalam mematuhi kontrol pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (AML/CFT) adalah kunci praktis untuk mempertahankan pemulihan peringkat kredit dan menjaga kepercayaan investor asing di sektor riil.

Bagi institusi keuangan internasional, khususnya Dana Moneter Internasional (IMF), disarankan untuk merumuskan kerangka regulasi dan pedoman kelembagaan yang lebih adaptif terhadap fenomena aset digital berdaulat. IMF tidak bisa lagi hanya bergantung pada mekanisme kondisionalitas yang bersifat punitif atau sekadar melarang penggunaan kripto. Rezim global perlu mengembangkan kapasitas teknis untuk mendampingi negara anggota yang ingin mengintegrasikan teknologi finansial baru ini, sehingga inovasi dapat dikelola di bawah koridor tata kelola risiko yang terukur, tanpa harus menunggu negara tersebut jatuh ke jurang krisis likuiditas terlebih dahulu.

Bagi pembuat kebijakan publik domestik, kasus ini memberikan preseden penting mengenai perlunya uji kelayakan ekonomi riil sebelum mengesahkan produk hukum moneter. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa tingkat penggunaan domestik terhadap Chivo Wallet untuk remitansi dan transaksi sehari-hari sangat rendah. Oleh karena itu, disarankan agar perumusan undang-undang yang bersifat disruptif harus didasarkan pada riset kesiapan infrastruktur sosial-ekonomi di tingkat akar rumput, bukan semata-mata didorong oleh ambisi politik atau pencitraan revolusioner dari pihak eksekutif.

Terakhir, bagi otoritas pengatur perbankan global dan lokal, disarankan untuk memprioritaskan regulasi yang berfokus pada interoperabilitas antara sistem keuangan fiat dan ekosistem kripto, alih-alih membiarkan keduanya beroperasi dalam kondisi zero-sum game. Stabilitas makroekonomi tidak dapat dicapai dengan memaksakan penggantian mata uang tradisional secara instan. Otoritas harus membangun kerangka hukum yang memfasilitasi integrasi yang aman, menjamin perlindungan konsumen yang ketat, dan memisahkan secara tegas antara liabilitas fiskal negara dengan volatilitas aset kripto, demi mencegah terjadinya kegagalan pasar politik yang merugikan masyarakat luas.